

**Implementasi Kebijakan Pengembangan Inovasi Pertanian
Spesifik Lokasi Di Balai Besar Pengkajian Dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
Balitbangtan**

Fina Arpah¹
Khasan Effendy²
Sampara Lukman³
Mansyur⁴

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2,3,4}

*Jalan Ir. Soekarno Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363^{1,2,3,4}*

Alamat email Koresponden: arpah17@yahoo.co.id

ABSTRACT

Achieving food security and nutrition is one of the national development priorities that the government is tasked with realizing. In the 2020-2024 RPJMN there are seven National Priorities (PN). The research design is a depiction of the research paradigm, the author chose a qualitative research approach to reveal and discuss the Implementation of the Performance Policy of the Center for Agricultural Technology Assessment and Development (BBP2TP) towards the Development of Location-Specific Agricultural Innovations. In its implementation, there are many things that influence it. One of the crucial things for the development of location-specific technology is how to harmonize technology development between the Research Center and the Agricultural Technology Assessment Center (BPTP). In the implementation of location-specific technology development policies coordinated by BBP2TP, many interests affect (Interest Affected) the Implementation of Location-Specific Agricultural Innovation Development Policies.

Keywords : *Implementation, development, Agricultural Technology*

PENDAHULUAN

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang menjadi tugas utama pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat tujuh Prioritas Nasional (PN), salah satunya adalah PN nomor 1 yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam PN tersebut terdapat Program Prioritas (PP) nomor 3 yaitu: Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementerian 2020-2024 adalah “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Adapun tujuan pembangunan pertanian adalah: meningkatkan pemantapan ketahanan pangan meningkatkan nilai tambah dan daya saing; dan mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan pengukuran IKU yang dilakukan secara berkala di BBP2TP terlihat bahwa BBP2TP masuk kategori sangat berhasil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada sisi lain, dari beberapa hasil penelitian, terlihat bahwa BPTP dan BBP2TP belum sepenuhnya optimal dalam pengembangan teknologi spesifik lokasi. Adanya kesenjangan antara pengukuran IKU dengan beberapa fakta di lapangan tersebut, menunjukan adanya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Dalam proses menghasilkan teknologi spesifik lokasi melibatkan banyak pihak, utamanya Balai Penelitian, BPTP, BBP2TP, serta sangat dipengaruhi oleh beragam kebijakan yang ada di berbagai tingkatan mulai dari tingkat Kementerian, Badan Litbang Pertanian dan juga di lingkup BBP2TP sendiri.

Berdasarkan situasi di atas, apa yang direncanakan sejak awal dalam proses pengembangan teknologi spesifik lokasi, dalam

perkembangannya sampai implementasi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan interes baik yang ada di lingkup Kementerian ataupun layer lainnya. Sehingga apa yang direncanakan bisa menjadi tidak optimal dalam implementasinya. Untuk melihat secara lebih detil bagaimana berbagai kepentingan dan interes itu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, serta implementasi akhirnya, maka penelaahan proses implementasi kebijakan menjadi suatu kajian yang menarik untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan penggambaran paradigma penelitian, penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk mengungkap dan membahas Implementasi Kebijakan Kinerja Balai Besar Pengakjian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) menuju Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi. Penelitian ini merupakan aktivitas "*observed facts*" yang menghasilkan "*knowledge based on experience*". Sumber data terdiri atas sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas, sehingga data dapat dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian dan pemecahan masalah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan diperlukan.

KERANGKA TEORI

Model Diversi Implementasi Kebijakan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi di Balai Besar Pengakjian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balitbangtan yang dirancang dengan suatu sistem manajemen penelitian. Kinerja manajemen penelitian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Input Analysis:** Penelitian dimulai dari: (1) fenomena Implementasi Kebijakan pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi di Balai

Besar Pengakajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balitbangtan menunjukkan permasalahan *administratif* dan masalah *managerial* yang menyebabkan Implementasi Kebijakan pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi di Balai Besar Pengakajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balitbangtan tidak efektif; (2) terhadap fenomena tersebut diajukan *quesi*, bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Di Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balitbangtan (3) guna menjawab *quesi* dipilih judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Di Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balitbangtan*” (4) dengan judul penelitian tersebut diajukan pertanyaan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian; (5) guna menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus mencapai tujuan penelitian dilakukan eksplorasi teori-teori untuk menemukan *applied theory* yang dapat dijadikan landasan teoritik penyusunan konsep dan instrumen penelitian. Fenomena, *quesi*, judul penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan *applied theory* tersebut menjadi elemen-elemen *Input Analysis* yang membentuk tahapan *Research Planning*.

2. **Process Analysis:** (1) menggunakan penelitian kualitatif; (2) penelitian dilakukan dengan mewawancara para informan penelitian yang unsur dan jumlahnya ditentukan dengan *snow ball technique*; (3) hasil penelitian dibahas dengan Analisis Deskriptif yang dikembangkan dengan metode analisis triangulasi pengamat menurut pendekatan model implementasi kebijakan publik Grindle. Pendekatan penelitian, aktivitas wawancara dengan para informan penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut adalah elemen-elemen *Process Analysis* yang membentuk tahapan *Research Executing*.

3. ***Output, Outcomen, Benefit Analysis:*** (1) *Output analysis* adalah temuan empirik (*research finding*) isu aktual yang diperoleh dari para informan penelitian, berdasarkan temuan penelitian tersebut disusun Model; (2) *Outcome Analysis* adalah Model Diversifikasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Di Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Balitbangtan(3) *Benefit Analysis* adalah Rekomendasi Praktis yang disampaikan kepada pihak yang diteliti dan para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. *Output, outcomen, benefit analysis* adalah elemen-elemen hasil akhir penelitian yang membentuk tahapan *Research Reporting*. Dan menemukan model baru penelitian Kebijakan Kinerja Balai Besar Pengakajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) menuju pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi.

PEMBAHASAN

Strategi Lima Cara Bertindak

Strategi Lima Cara Bertindak (5 CB) yang dirumuskan Kementerian Pertanian pada masa Pandemi Covid-19 dalam perkembangannya dijadikan sebagai strategi utama pembangunan pertanian. Dalam implementasinya, Cara Bertindak kesatu hingga kelima dapat diterapkan untuk pengembangan masing-masing komoditas pertanian, termasuk padi. Berikut uraian ringkas dari masing-masing Cara Bertindak tersebut:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah; perluasan areal tanam baru untuk komoditas strategis terutama padi, jagung, bawang merah, dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih defisit.

- b. Peningkatan diversifikasi pangan dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga.
- c. Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik.
- d. Pengembangan pertanian modern dilakukan dengan (i) pengembangan *smart farming*, (ii) pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi), (iii) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan (iv) pengembangan korporasi petani.
- e. Peningkatan ekspor tiga kali lipat merupakan suatu gerakan untuk: (i) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemda dan *stakeholder* terkait, (ii) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian, (iii) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreneur, dan (iv) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja sama bilateral/multilateral.

Strategi “*Budget for Agriculture*”

Tugas pemerintah untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, terutama dari produksi dalam negeri diamanatkan kepada Kementerian. Menghadapi tantangan dalam situasi yang tidak biasa ini, untuk menjalankan amanat yang diembannya, Kementerian Pertanian mendesain kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan produksi pangan dengan rancangan inovatif, seperti yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Seperti diindikasikan oleh data dari BPS, berbagai upaya tersebut membawa hasil. Secara umum dapat

dikemukakan bahwa “pada tahun 2021-2022 capaian produksi beras domestik mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, bahkan mengalami surplus”. Pada dua tahun masa pandemi Covid-19 tersebut, Indonesia “mampu mencapai swasembada beras”. Di samping itu, “status capaian ketahanan pangan dan gizi juga dapat dipertahankan”.

Pencapaian Swasembada Beras di Masa Pandemi

Dari data BPS diketahui pada masa pandemi tersebut memang terdapat impor beras lebih dari 300 ribu ton/tahun. Namun beras impor ini tidak ditujukan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat secara umum. Seperti dikemukakan di atas, untuk total kebutuhan beras untuk konsumsi sekitar 30 juta ton, sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Beras yang diimpor berupa jenis khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu, seperti beras jenis Basmati, Japonica, Hom Mali, beras rendak glikemik indeks sebagai beras sehat, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan industri pangan (tepung dan bijih).

Ketahanan Pangan Nasional dan Teknologi Pertanian

Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, tidak saja melalui peningkatan produktivitas hasil pertaniannya tapi juga melalui peningkatan produktivitas per petani. Untuk itu perlu dilakukan terobosan manajemen usahatani yang memberikan efisiensi pengelolaan usahatani, baik melalui usahatani sistem korporasi ataupun dengan sistem terobosan lainnya. Upaya ini untuk mengurangi petani gurem yang hanya mengusahakan kurang dari setengah hektar lahan, sehingga mampu mengusahakan lahan hingga seluas 2 hektar.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terutama pada bagian terakhir disertasi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasinya banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satu hal krusial bagi terbangunnya pengembangan

teknologi spesifik lokasi adalah bagaimana terjadi harmonisasi pengembangan teknologi antara Balai Penelitian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Dalam hal ini peran BBP2TP sangat dominan dalam harmonisasi proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan di lapang.

2. Dalam implementasi kebijakan pengembangan teknologi spesifik lokasi yang dikoordinasikan BBP2TP, banyak kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*) Implementasi Kebijakan Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi.
3. Ditinjau dari sisi tipe manfaat (*Type of Benefits*) yang dikehendaki atau yang diharapkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*) dalam proses Implementasi Kebijakan Kinerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Menuju Pengembangan Inovasi Pertanian spesifik lokasi.
4. Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja kerja sama antara BPTP dan Balai Komoditas. Kurangnya kegiatan padu padan yang mempertemukan Balai Penelitian dan BPTP, menjadi faktor internal utama yang membuat pengembangan teknologi spesifik lokasi tidak berkembang dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Sukoco, I., & Muhyi, H. A. (2015). Ecopreneurship Dalam Menumbuhkan Usaha Berwawasan Lingkungan Pada Sentra Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 17(2), 155. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7304>
- “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia” pada Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM (2017), hlm 1-28
- Yulinar, L., & Sobandi, B. (2015). Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) (Kasus Pt. Pindad) Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja*, 18, 198–235. <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/214/127>

- Haq, A. N. H., Basuni, S., & Sunkar, A. (2021). Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) Policies and Program Of Palm Oil Plantation Companies In PT Perkebunan Nusantara V Riau Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(4), 715–724. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724>
- Darwisi, dkk. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR), 06 (1), 1-9. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21482>.
- Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja*. In Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/41380/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Farid, M., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2017). *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. Lentera Hukum, 4(2), 95–108. <https://doi.org/10.19184/EJLH.V4I2.5128>
- Rumawas, Virginia V, dkk. (2021). Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). (1)1. 1-12
- Candrayanthi, A. A. A., & Saputra, I. D. G. D. (2013). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia)*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(1), 141–158. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5899/4799>